

Model Perencanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal Berdasarkan Standar Nasional Berbasis Analisis Kebutuhan Daerah Tanah Bumbu Kalimantan Selatan

Ambo Sakka^{1✉}, Hasnah², Muhammad Muthahari Ramadhani³

¹Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia

²Program Studi Manajemen, Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

³Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia

Korespondensi Email: ambosakka@ulm.ac.id[✉]

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengkaji model perencanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PnF) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) berbasis analisis kebutuhan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kajian teknis ini menganalisis tingkat keterpenuhan delapan standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan instrumen penilaian SNP, tes kemampuan akademik, penilaian sarana prasarana, dan data akreditasi sekolah. Populasi kajian mencakup 337 satuan PAUD yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Sekolah Standar Nasional (SSN) telah menunjukkan kemajuan signifikan, namun masih terdapat kesenjangan pemenuhan standar antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Peta jalan implementasi SSN 2025–2030 disusun menggunakan pendekatan AGIL dengan target peningkatan bertahap pada semua komponen standar. Rekomendasi mencakup penguatan kurikulum berbasis kearifan lokal, peningkatan kompetensi pendidik, pemerataan sarana prasarana, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung terwujudnya PAUD berstandar nasional yang berkualitas dan merata.

Kata kunci: PAUD, Pendidikan Non-Formal, Standar Nasional Pendidikan, Tanah Bumbu, perencanaan pendidikan

Submitted	: 28 February 2026
Revised	: 01 March 2026
Acceptance	: 06 March 2026
Publish Online	: 07 March 2026

Pendahuluan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal berperan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia sejak usia awal pertumbuhan. Periode 0–6 tahun telah diakui secara global sebagai periode emas yang menentukan arah perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral anak ([Santrock, 2019](#); [Magendie et al., 2023](#)). Pendidikan pada masa ini bukan sekadar pengasuhan tetapi merupakan proses pembelajaran berstruktur yang memberikan stimulasi optimal bagi kemampuan dasar anak ([Putri et al., 2025](#)).

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kerangka normatif yang mengatur mutu layanan pendidikan di Indonesia, termasuk PAUD dan Pendidikan Non Formal. SNP mencakup standar isi, proses, kompetensi pendidik, sarana prasarana, dan lain-lain yang menjadi tolok ukur mutu penyelenggaraan pendidikan ([Putri et al., 2025](#); [Shalehah, 2023](#)). Implementasi SNP pada PAUD dan jalur nonformal menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan belum optimalnya penerapan SNP dalam PAUD dan Pendidikan Non Formal, terutama di daerah otonom seperti Kabupaten Tanah Bumbu. Beberapa penelitian mengungkap disparitas kualitas layanan pendidikan di wilayah pinggiran yang berkaitan dengan keterbatasan sarana, kompetensi pendidik, dan dukungan kebijakan ([Maulida, 2021](#); [Yulianti & Rusmini, 2023](#)). Kondisi ini menunjukkan perlunya model perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Analisis kebutuhan wilayah menjadi instrumen krusial dalam merancang model perencanaan pendidikan yang tepat sasaran. Pendekatan analisis kebutuhan pendidikan secara empiris membantu pemangku kepentingan mengidentifikasi celah antara kondisi aktual dan standar nasional yang diharapkan ([Putra & Rahayu, 2020](#); [Wijaya, 2021](#)). Pemahaman yang baik atas kondisi kebutuhan ini merupakan basis perencanaan yang efektif dan berkelanjutan.

Model perencanaan pendidikan berbasis analisis kebutuhan daerah menawarkan kerangka sistematis untuk mengatasi kesenjangan mutu layanan pendidikan. Model ini tidak hanya memperhitungkan indikator standar nasional, tetapi juga konteks sosial-budaya, ekonomi, dan demografis setempat ([Garnika & Rohiyatun, 2025](#); [Lisnawati et al., 2024](#)). Dengan demikian, model ini lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan lokal.

Tabel 1. Sintesis Permasalahan, Dasar Teoretik, dan Urgensi Pengembangan Model Perencanaan PAUD Berbasis Analisis Kebutuhan Daerah, 2025

No	Aspek Strategis	Kondisi Empiris	Dasar Teoretik / Kebijakan	Kesenjangan (Gap)	Urgensi Model Perencanaan
1	Perkembangan PAUD	Pertumbuhan jumlah lembaga meningkat	Teori perkembangan anak usia dini (Santrock, 2019; Berk, 2021)	Pertumbuhan kuantitatif belum diikuti kualitas	Perlu model perencanaan berbasis mutu
2	Standar Nasional	Implementasi SNP belum	Kebijakan SNP (Putri et al.,	Belum semua indikator	Integrasi SNP dalam model

	Pendidikan (SNP)	merata	2025; Shalehah, 2023)	terpenuhi	perencanaan
3	Disparitas Wilayah	Perbedaan kualitas antar kecamatan	Manajemen mutu pendidikan daerah (Yulianti & Rusmini, 2023)	Perencanaan belum berbasis kebutuhan lokal	Model berbasis analisis kebutuhan daerah
4	Analisis Kebutuhan	Perencanaan masih administratif	Perencanaan berbasis data (Putra & Rahayu, 2020; Wijaya, 2021)	Minim pemetaan gap berbasis indikator	Penyusunan roadmap berbasis evidence
5	Kompetensi Pendidik	Kualifikasi & pelatihan belum merata	Profesionalisme guru (Lestari & Putri, 2023; Ratna, 2025)	Pengembangan SDM belum sistematis	Integrasi peningkatan kompetensi dalam model
6	Sarana Prasarana	Fasilitas belum memenuhi standar di beberapa wilayah	Standar sarana PAUD (Maulida, 2021)	Ketimpangan infrastruktur	Skema prioritas pembiayaan berbasis kebutuhan
7	Pendidikan Non Formal	Akses meningkat namun mutu bervariasi	Pendidikan nonformal inklusif (Lisnawati et al., 2024)	Belum terintegrasi dalam sistem mutu	Model terpadu PAUD & Non Formal
8	Konteks Lokal Tanah Bumbu	Tantangan geografis & demografis	School readiness & regional planning (Magendie et al., 2023)	Model nasional belum sepenuhnya kontekstual	Adaptasi model sesuai karakteristik daerah

Pendidik PAUD dan Non Formal merupakan ujung tombak pelaksanaan layanan pendidikan, sehingga kemampuan profesionalisme mereka menentukan mutu hasil pembelajaran anak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional menjadi faktor kunci dalam memenuhi SNP ([Lestari & Putri, 2023](#); [Ratna, 2025](#)). Hal ini memperkuat argumen bahwa perencanaan tidak boleh terlepas dari pengembangan kapasitas SDM pendidikan.

Ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana pendidikan juga menjadi pilar penting dalam perencanaan berbasis standar. Terdapat bukti bahwa pemenuhan fasilitas yang belum optimal di daerah tertentu berkorelasi dengan keterbatasan akses dan kualitas pendidikan ([Maulida, 2021](#); [Putri et al., 2025](#)). Upaya penyusunan model perencanaan harus mencakup strategi pemenuhan sarana belajar yang sesuai dengan

standar nasional.

Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan model perencanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal berdasarkan Standar Nasional yang dipadukan dengan Analisis Kebutuhan Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang sah dan aplikatif dalam meningkatkan mutu pendidikan awal secara terintegrasi, kontekstual, dan berkelanjutan ([Magendie et al., 2023](#); [Putra & Rahayu, 2020](#)).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PnF) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Populasi penelitian mencakup 325 satuan PAUD yang tersebar di 12 kecamatan, mulai dari wilayah pesisir hingga pedalaman. Pemilihan sampel dilakukan secara bertahap berbasis pemeringkatan skor SNP, dengan memilih tiga sekolah skor tertinggi per kecamatan sehingga diperoleh 36 sekolah nominasi. Pengumpulan data dilakukan melalui empat instrumen yang terintegrasi, yaitu: angket penilaian mandiri (self-assessment) implementasi delapan SNP yang diisi oleh guru, kepala sekolah, pengawas, dan komite sekolah; tes kemampuan akademik (TKA) peserta didik pada domain audio, visual, dan kinestetik; observasi kualitas sarana prasarana (SAPRAS) oleh tim khusus mengacu pada SNI 1726:2019, SNI 2847:2019, dan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023; serta data akreditasi sekolah dari Badan Akreditasi Nasional ([Creswell & Creswell, 2022](#); [Prasetyo & Widodo, 2023](#)).

Analisis data dilakukan secara multistage menggunakan metode agregasi berbobot berbasis pemodelan Rasch dengan aplikasi Winsteps, yang menghasilkan skor logit person measure sebagai dasar pemeringkatan komprehensif sekolah ([Sumintono & Widhiarso, 2022](#)). Skor dari empat variabel utama — SSN, TKA, SAPRAS, dan akreditasi — dikompilasi secara bertahap untuk mengkonfirmasi konsistensi dan validitas data penilaian antarinstrumen. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka analisis kebutuhan daerah (needs assessment) yang menempatkan konteks lokal, kondisi demografis, sosial-ekonomi, dan regulasi daerah sebagai basis perencanaan strategis ([Stufflebeam & Zhang, 2017](#); [Mulyani, 2024](#)). Peta jalan implementasi Sekolah Standar Nasional (SSN) periode 2025–2030 disusun menggunakan pendekatan AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latent Pattern Maintenance) yang dikembangkan secara intersektoral dengan melibatkan Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait sebagai strategi kolaboratif dalam mewujudkan PAUD berstandar nasional yang merata dan berkualitas ([Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025](#); [Prasetyo & Widodo, 2023](#)).

Hasil Penelitian

Hasil analisis implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada 325 satuan PAUD di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan rata-rata skor pemenuhan sebesar 3,63 pada skala 1–4. Angka ini menempatkan kondisi PAUD di Tanah Bumbu pada kategori "cukup", belum mencapai kategori "baik" secara optimal. Terdapat variasi signifikan di antara delapan standar, dengan rentang skor antara 3,35 hingga 3,77. Standar Pembiayaan mencatat skor tertinggi (3,77), diikuti Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan (3,72) serta Standar Isi (3,71), sedangkan Standar Sarana dan Prasarana

menempati posisi terendah (3,35). Pola yang konsisten ditemukan pada hierarki penilaian, di mana guru hampir selalu memberikan penilaian tertinggi, sementara pengawas secara konsisten memberikan penilaian terendah pada semua standar. Kesenjangan persepsi ini mengindikasikan perbedaan perspektif antara pelaksana operasional di lapangan dengan pemantau eksternal, yang sejalan dengan temuan [Mulyani \(2024\)](#) bahwa penilaian mandiri internal cenderung lebih optimistis dibandingkan penilaian eksternal terhadap kualitas layanan pendidikan.

Standar Isi memperoleh skor 3,71 dengan rentang indikator 3,43 hingga 3,90. Indikator kesesuaian kurikulum dengan SNP mencatat skor tertinggi (3,90), sedangkan indikator integrasi muatan lokal berada pada posisi terendah (3,43) dengan skor pengawas hanya 3,24. Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek administratif kurikulum telah berjalan cukup baik, namun kontekstualisasi pembelajaran berbasis kearifan lokal masih sangat terbatas. Standar Proses mencatat rata-rata 3,58, dengan indikator keterlaksanaan pembelajaran interaktif mendapat skor tertinggi (3,87), sedangkan akomodasi kebutuhan khusus peserta didik dan integrasi pembelajaran luar kelas menjadi kelemahan terbesar dengan skor di bawah 3,50. Sementara itu, Standar Kompetensi Lulusan memperoleh rata-rata 3,56 sebagai standar terendah ketujuh, dengan kelemahan pada mekanisme umpan balik dari pemangku kepentingan eksternal (skor 3,27). Kondisi ini selaras dengan temuan [Prasetyo dan Widodo \(2023\)](#) bahwa banyak satuan PAUD di daerah berkembang menghadapi tantangan dalam menghubungkan pencapaian kompetensi dengan kebutuhan dunia nyata yang terukur.

Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan memperoleh skor 3,72, menempatkannya pada posisi kedua tertinggi. Indikator akses pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan workshop mencatat skor tertinggi hampir sempurna, yakni 3,99, dengan guru dan kepala sekolah bahkan memberikan skor di atas 4,00. Ini menunjukkan kepuasan tinggi terhadap program pelatihan yang tersedia. Namun, indikator pemenuhan kualifikasi akademik sesuai standar berada pada posisi terendah (3,63) dengan skor pengawas hanya 3,23 — kesenjangan terbesar sepanjang seluruh indikator yakni 0,52 poin di bawah persepsi guru. Temuan ini sejalan dengan data kuantitatif yang menunjukkan bahwa per tahun 2024 masih terdapat 476 guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi S1/DIV, dengan dominasi dari sekolah swasta sebanyak 360 orang. Proporsi guru PAUD berkualifikasi S1/DIV baru mencapai 55,46% pada 2024, meningkat dari 52,92% pada 2023 ([Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, 2025](#)). Rendahnya kualifikasi formal ini berpotensi berdampak pada kualitas pembelajaran, sebagaimana diungkapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ([2025](#)) bahwa standar kompetensi pendidik merupakan kunci dalam penjaminan mutu PAUD.

Standar Sarana dan Prasarana menjadi area paling kritis dengan skor terendah 3,35. Seluruh kelompok responden memberikan penilaian di bawah rata-rata standar lainnya, dengan skor guru 3,42 dan pengawas hanya 3,08. Konsistensi skor rendah dari semua perspektif mengkonfirmasi bahwa keterbatasan fasilitas fisik merupakan masalah nyata yang diakui oleh seluruh pemangku kepentingan. Secara spesifik, indikator kondisi ruang kelas memperoleh skor 3,14, fasilitas olahraga/seni hanya 3,02, dan kelengkapan alat permainan edukatif (APE) mencatat skor terendah, yakni 2,73. Hasil observasi langsung pada 36 sekolah nominasi juga mengkonfirmasi kesenjangan yang nyata: skor observasi sarana-prasarana berada pada rentang 37–81 poin, dengan distribusi yang tidak berkorelasi linear dengan skor SSN. Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan berbasis data demografis menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat defisit 83 unit

TK/RA dari kebutuhan 286 unit, dan defisit ini diprediksi terus meningkat hingga 145 unit pada 2045 jika tidak ada intervensi signifikan (Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, 2025). Kondisi ini memperkuat perlunya percepatan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas PAUD sebagaimana diamanatkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana PAUD.

Standar Pengelolaan memperoleh skor 3,69 dengan kekuatan utama pada keselarasan visi-misi dengan standar nasional (3,94) dan pelaksanaan perencanaan partisipatif (3,76). Sementara kelemahan teridentifikasi pada sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan (3,63) serta mekanisme pengembangan inovasi (3,63). Standar Pembiayaan mencatat skor tertinggi di antara delapan standar, yakni 3,77, dengan indikator penggunaan dana sesuai rencana dan sistem pelaporan keuangan keduanya memperoleh skor 3,88. Tingginya penilaian dari tiga kelompok internal (guru, kepala sekolah, komite) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan telah dirasakan secara positif. Namun, skor pengawas yang lebih rendah (3,47–3,76) pada beberapa indikator mengisyaratkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam hal kepatuhan terhadap regulasi dan dokumentasi keuangan pendidikan. Hal ini konsisten dengan temuan [Rahman \(2022\)](#) bahwa pengelolaan pembiayaan di daerah berkembang sering kali menghadapi ketimpangan antara laporan formal dan implementasi aktual di lapangan.

Analisis komparatif antara skor SSN dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada 36 sekolah nominasi mengungkap pola yang variatif dan cenderung tidak linier. Di Kecamatan Batulicin, TK Negeri Pembina mencatat skor SSN tertinggi (4,74; peringkat 1) namun kemampuan akademik peserta didik berada di peringkat ke-21 (skor 12,00). Sebaliknya, PAUD Islam Terpadu TK-KB Permata dengan skor SSN 4,44 justru mencatat capaian akademik lebih tinggi di peringkat ke-8 (skor 14,20). Pola serupa ditemukan di Kecamatan Karang Bintang, di mana PAUD Terpadu TK-KB Anggrek dengan skor SSN terendah (3,55; peringkat 30) justru mencatat kemampuan akademik tertinggi (peringkat 1, skor 14,78). Sebaliknya, TK Negeri Pembina Kecamatan Karang Bintang dengan SSN tinggi (4,65; peringkat 3) memiliki capaian akademik rendah (peringkat 27). Ketidakselarasan ini menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak semata ditentukan oleh pemenuhan standar administratif, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran, kompetensi pendidik, dan strategi pedagogis yang diterapkan di kelas, sejalan dengan temuan Sumintono dan Widhiarso (2022) bahwa instrumen penilaian berbasis persepsi perlu divalidasi silang dengan data capaian belajar yang terukur secara objektif.

Perbandingan antara skor SSN dan hasil observasi kualitas sarana-prasarana pada 36 sekolah nominasi menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan. Sekolah dengan skor SSN tertinggi, yakni PAUD Terpadu TK/KB Anggrek (skor 5,00; peringkat SSN 1), justru memiliki sarana-prasarana pada peringkat ke-26 (skor 49). Sebaliknya, KB IT Dhia El Widad mencatat nilai observasi sarana-prasarana tertinggi (skor 81; peringkat 1), namun skor SSN berada di peringkat ke-24 (skor 4,07). Hanya sebagian kecil sekolah yang menunjukkan keselarasan antara kedua indikator, seperti TK Islam Al-Fath yang memperoleh peringkat ke-13 pada SSN maupun observasi sarana-prasarana. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi pemenuhan standar yang tinggi dapat dicapai meski dukungan infrastruktur fisik belum memadai — kemungkinan karena instrumen self-assessment belum sepenuhnya mampu mengukur kondisi fisik riil. Ketidaksesuaian ini mempertegas perlunya audit fisik berkala sebagai mekanisme konfirmasi di luar penilaian persepsi, sebagaimana direkomendasikan oleh [Stufflebeam](#)

[dan Zhang \(2017\)](#) dalam kerangka evaluasi CIPP bahwa data konteks dan input fisik harus divalidasi secara independen.

Analisis komparatif antara skor SSN dan status akreditasi menunjukkan pola yang tidak linier pada sebagian besar kecamatan. Secara keseluruhan, distribusi akreditasi PAUD di Kabupaten Tanah Bumbu didominasi oleh level menengah, dengan 47,2% sekolah berakreditasi B, hanya 11,1% berakreditasi A, dan 41,6% masih pada akreditasi C atau belum terakreditasi. Ketidakselarasan antara SSN dan akreditasi bersumber dari perbedaan indikator penilaian: SSN merefleksikan persepsi internal terhadap proses pemenuhan standar, sedangkan akreditasi merupakan penilaian eksternal terhadap kelayakan institusi secara holistik termasuk aspek administratif dan dokumentasi. Di Kecamatan Kusan Hilir, misalnya, KB Nusa Indah memiliki skor SSN tinggi (4,56; peringkat 5) namun hanya mendapat akreditasi C, sementara TK Negeri Pembina dengan skor SSN menengah (peringkat 16) justru meraih akreditasi A. Pola ini konsisten di berbagai kecamatan, di mana sekolah negeri cenderung lebih siap memenuhi standar akreditasi administratif berkat dukungan sistemik dari pemerintah, sedangkan sekolah swasta unggul dalam pelayanan operasional namun lemah pada dokumentasi kelembagaan. Temuan ini memperkuat argumentasi [Prasetyo dan Widodo \(2023\)](#) bahwa sinkronisasi antara instrumen penilaian internal dan eksternal merupakan agenda strategis yang perlu diperkuat dalam peta jalan peningkatan mutu pendidikan daerah.

Tabel 2. Hasil Penelitian Berdasarkan Aspek Pendahuluan dan Analisis Kebutuhan Daerah, 2025

No	Aspek dalam Pendahuluan	Indikator yang Dianalisis	Temuan Empiris di Tanah Bumbu	Analisis Kesenjangan (Gap)	Implikasi terhadap Model
1	Pertumbuhan PAUD & Non Formal	Jumlah lembaga dan peserta didik	Terjadi peningkatan jumlah satuan PAUD dan lembaga nonformal dalam 5 tahun terakhir	Pertumbuhan kuantitatif belum diikuti peningkatan mutu layanan	Model harus menekankan keseimbangan kuantitas dan kualitas
	Implementasi Standar Nasional Pendidikan	8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Standar isi dan proses relatif terpenuhi, namun standar sarpras dan pendidik belum optimal	Belum seluruh indikator SNP terpenuhi secara merata	Integrasi indikator SNP dalam perencanaan berbasis prioritas
3	Disparitas Wilayah	Sebaran mutu antar kecamatan	Terdapat perbedaan signifikan antara wilayah pusat dan	Perencanaan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan	Model berbasis analisis kebutuhan spasial

			pinggiran	wilayah	
4	Kompetensi Pendidik	Kualifikasi akademik dan pelatihan	Sebagian pendidik belum memenuhi kualifikasi S1/D4 dan pelatihan berkelanjutan	Kesenjangan kompetensi pedagogik	Komponen peningkatan SDM menjadi bagian inti model
5	Sarana dan Prasarana	Ruang belajar, sanitasi, APE	Beberapa satuan belum memenuhi standar minimal sarana	Ketimpangan infrastruktur pendidikan	Penyusunan skema prioritas pembiayaan berbasis gap
6	Literasi dan Numerasi Awal	Capaian perkembangan anak	Aspek sosial-emosional baik, literasi numerasi masih perlu penguatan	Belum ada intervensi sistematis pada literasi dini	Integrasi program penguatan literasi dalam model
7	Pendidikan Non Formal	Program kesetaraan & kecakapan hidup	Akses meningkat, mutu pembelajaran bervariasi	Belum terintegrasi dengan sistem evaluasi mutu PAUD	Model terpadu PAUD dan Non Formal
8	Perencanaan Pendidikan	Mekanisme perencanaan daerah	Perencanaan masih bersifat administratif dan belum berbasis data komprehensif	Minim penggunaan analisis kebutuhan berbasis indikator	Model perencanaan berbasis evidence dan roadmap jangka menengah

Data partisipasi pendidikan menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami fluktuasi, dari 66,76% pada 2021 menjadi 69,79% pada 2023, namun kembali turun ke 67,43% pada 2024. Penurunan ini dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya: rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD, keterbatasan akses di wilayah terpencil, beban ganda orang tua, dan belum adanya kewajiban formal mengikuti PAUD sebelum masuk SD. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 8,43 tahun pada 2024, masih berada di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan (8,62 tahun) dan jauh dari target wajib belajar yang akan diperluas menjadi 13 tahun, di mana satu tahun PAUD akan menjadi komponen wajib. Proyeksi demografis menunjukkan bahwa jumlah anak usia pra-sekolah (3–6 tahun) akan terus meningkat dari 21.480 jiwa pada 2025 menjadi 25.613 jiwa pada 2045, sehingga defisit sarana pendidikan pun akan semakin melebar jika tidak ada penambahan unit layanan yang signifikan ([Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, 2025](#); [BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025](#)). Kondisi ini menegaskan urgensi model perencanaan PAUD berbasis analisis kebutuhan daerah yang komprehensif, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2025)

dalam kebijakan transformasi pendidikan anak usia dini menuju layanan yang universal, bermutu, dan merata.

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengungkap paradoks yang mendasar dalam implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Kabupaten Tanah Bumbu: tingginya skor pemenuhan standar secara perseptual tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas output pembelajaran peserta didik. Rata-rata skor SNP sebesar 3,63 yang berada pada kategori "cukup" mencerminkan kondisi di mana pelaksanaan standar masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh dimensi substantif pembelajaran. Hal ini terkonfirmasi dari analisis komparatif antara skor SSN dan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang menunjukkan hubungan tidak linier di sebagian besar kecamatan — sekolah dengan skor SSN tertinggi tidak selalu menghasilkan capaian akademik peserta didik yang tertinggi. Fenomena ini sejalan dengan kajian [Sari dan Nugroho \(2025\)](#) yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar formal sering kali lebih mencerminkan kapasitas dokumentasi dan administratif suatu institusi daripada kualitas proses belajar yang sesungguhnya terjadi di kelas. Oleh karena itu, pengembangan model perencanaan PAUD yang kontekstual memerlukan pergeseran paradigma dari orientasi pemenuhan standar administratif menuju orientasi peningkatan mutu proses pembelajaran yang terukur dan berdampak langsung pada perkembangan anak usia dini ([Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025](#)).

Standar Sarana dan Prasarana yang memperoleh skor terendah (3,35) dengan indikator alat permainan edukatif hanya mencapai 2,73 dan kondisi ruang kelas 3,14 mengkonfirmasi bahwa keterbatasan infrastruktur fisik merupakan masalah struktural yang paling kritis dalam sistem PAUD Tanah Bumbu. Hasil observasi langsung memperlihatkan skor sarana-prasarana yang sangat bervariasi, dari 37 hingga 81 poin, dengan distribusi yang timpang antara sekolah negeri dan swasta, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini diperparah oleh proyeksi demografis yang menunjukkan defisit 83 unit TK/RA pada tahun 2025 dan berpotensi membengkak hingga 145 unit pada 2045, sementara jumlah anak usia pra-sekolah diproyeksikan terus meningkat seiring tingginya migrasi ke Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, 2025). Disparitas ini memperkuat argumen bahwa perencanaan PAUD berbasis analisis kebutuhan daerah (*needs-based planning*) bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan keharusan strategis. [Rahman \(2022\)](#) menekankan bahwa strategi penanggulangan disparitas layanan pendidikan di daerah berkembang harus berpijak pada pemetaan kebutuhan yang akurat dan terbarukan, bukan hanya pada alokasi anggaran yang bersifat rata (*equitable allocation*) tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Sinkronisasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan dalam perencanaan dan pengadaan sarana-prasarana PAUD menjadi prasyarat utama yang tidak dapat ditawar untuk mewujudkan pemerataan layanan ([Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023](#)).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan memperoleh skor relatif tinggi (3,72), di balik angka itu tersimpan kelemahan mendasar: indikator pemenuhan kualifikasi akademik formal memperoleh skor terendah (3,63) dengan penilaian pengawas hanya 3,23, dan secara faktual masih terdapat 476 guru PAUD yang belum berkualifikasi S1/DIV per tahun 2024. Kesenjangan antara persepsi internal yang optimistis dengan realitas kualifikasi yang

dinilai pengawas sebesar 0,52 poin merupakan yang terbesar di seluruh indikator dan mengindikasikan adanya blind spot dalam sistem penjaminan mutu internal. Kondisi ini relevan dengan temuan [Mulyani \(2024\)](#) bahwa penguatan SDM pendidikan di daerah berkembang seringkali terhambat oleh bias konfirmasi internal, di mana pelaksana cenderung menilai diri sendiri lebih baik dari kondisi aktualnya. Lebih lanjut, meskipun akses terhadap pelatihan mendapat apresiasi tinggi (3,99), hal itu belum cukup untuk menggantikan kualifikasi formal sebagai landasan kompetensi pedagogis yang berkelanjutan. Program transformasi pedagogis yang sistematis, mencakup pelatihan berbasis kompetensi, mentoring dari perguruan tinggi, dan sertifikasi profesi yang terjangkau bagi guru swasta di daerah terpencil, merupakan intervensi yang paling mendesak untuk dilaksanakan, sebagaimana ditegaskan dalam peta jalan SSN 2025–2030 yang menargetkan 90% pendidik PAUD berkualifikasi minimal D4/S1 pada tahun 2030 ([Prasetyo & Widodo, 2023](#); [Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, 2025](#)).

Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah ketidaksinkronan antara empat instrumen penilaian mutu yang digunakan — SSN, TKA, SAPRAS, dan Akreditasi — yang secara konsisten menunjukkan pola korelasi tidak linier. Fakta bahwa 47,2% satuan PAUD baru mencapai akreditasi B dan 41,6% masih pada akreditasi C atau belum terakreditasi, sementara skor SSN rata-rata berada pada kategori "cukup", mengindikasikan bahwa kedua instrumen tersebut mengukur dimensi yang berbeda dan belum terintegrasi dalam satu sistem penjaminan mutu yang koheren. SSN merefleksikan persepsi internal stakeholder sekolah terhadap proses pemenuhan standar, sedangkan akreditasi merupakan penilaian eksternal yang lebih ketat terhadap kelayakan institusional secara holistik. Ketidaksesuaian ini menguatkan argumen [Stufflebeam dan Zhang \(2017\)](#) bahwa evaluasi pendidikan yang komprehensif harus mencakup empat dimensi CIPP secara simultan — konteks, input, proses, dan produk — sehingga tidak ada aspek yang dinilai secara terpisah tanpa mengaitkannya dengan dimensi lainnya. Dalam konteks Tanah Bumbu, urgensi membangun sistem evaluasi terpadu yang mengharmoniskan instrumen internal dan eksternal menjadi sangat krusial, khususnya agar satuan PAUD swasta yang mendominasi 89,6% dari 337 lembaga dapat memiliki panduan penilaian yang jelas dan dapat ditindaklanjuti secara operasional. [Sari dan Nugroho \(2025\)](#) menekankan bahwa pembaruan kebijakan evaluasi yang berkelanjutan merupakan kunci agar sistem penjaminan mutu pendidikan daerah tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan kondisi lokal dan nasional.

Tabel 3. Matriks Gap Analysis Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) PAUD dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Tanah Bumbu, 2025

No	Standar Nasional Pendidikan	Indikator Kunci	Kondisi Aktual	Standar Nasional	Tingkat Gap
1	Standar Isi	Dokumen kurikulum & perencanaan pembelajaran	Kurikulum tersedia, implementasi belum sepenuhnya kontekstual	Kurikulum berbasis perkembangan anak dan kebutuhan lokal	Sedang
2	Standar Proses	Pelaksanaan pembelajaran	Pembelajaran aktif sudah	Pembelajaran berbasis	Sedang

		aktif & holistik	berjalan namun belum konsisten	bermain dan diferensiasi	
3	Standar Kompetensi Lulusan	Capaian perkembangan anak (6 aspek)	Sosial-emosional baik, literasi numerasi belum optimal	Perkembangan anak seimbang di seluruh aspek	Tinggi
4	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik & sertifikasi	Sebagian belum S1/D4 & belum tersertifikasi	Minimal S1/D4 dan kompetensi profesional	Tinggi
5	Standar Sarana dan Prasarana	Ruang belajar, sanitasi, APE	Beberapa satuan belum memenuhi standar minimal	Sarana sesuai ketentuan nasional PAUD	Tinggi
6	Standar Pengelolaan	Perencanaan & evaluasi berbasis data	Perencanaan masih administratif	Manajemen berbasis mutu dan data	Sedang
7	Standar Pembiayaan	Transparansi & kecukupan dana	Bergantung pada dana BOS & swadaya	Pembiayaan memadai dan berkelanjutan	Sedang
8	Standar Penilaian	Evaluasi perkembangan anak	Penilaian dilakukan namun belum terdokumentasi sistematis	Penilaian autentik dan terdokumentasi	Sedang

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini merekomendasikan penerapan model perencanaan PAUD berbasis pendekatan AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latent Pattern Maintenance) sebagai kerangka strategis yang paling sesuai dengan konteks Kabupaten Tanah Bumbu. Dimensi Adaptation diwujudkan melalui penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran berbasis kearifan lokal Kalimantan Selatan yang diintegrasikan dengan teknologi pembelajaran mutakhir, merespons kelemahan integrasi muatan lokal yang hanya memperoleh skor 3,43. Dimensi Goal Attainment dioperasionalkan melalui target bertahap yang terukur pada delapan SNP, dengan basis data 2025 yang menunjukkan rentang capaian 81%–87% dan target minimal 90%–100% pada 2030. Dimensi Integration mengharuskan kolaborasi lintas SKPD yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Bappeda dalam satu platform perencanaan terpadu, mengingat 90 lembaga PAUD yang belum terakreditasi dan defisit sarana yang tidak dapat diselesaikan oleh sektor pendidikan sendiri. Dimensi Latent Pattern Maintenance memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai lokal sebagai pondasi pembentukan peserta didik yang adaptif dan berketahanan. Model ini relevan dengan arah kebijakan transformasi pendidikan nasional yang menekankan pentingnya PAUD sebagai fondasi wajib belajar 13 tahun ([Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,](#)

[2025](#)), serta sejalan dengan kerangka needs assessment berbasis bukti yang dikembangkan [Prasetyo dan Widodo \(2023\)](#) untuk perencanaan pendidikan daerah yang responsif, berkelanjutan, dan berpusat pada tumbuh kembang optimal anak usia dini sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang Kabupaten Tanah Bumbu.

Kesimpulan

1. Pemenuhan SNP Berada pada Kategori Cukup dengan Kesenjangan Antarstandar yang Signifikan. Implementasi delapan SNP pada 325 satuan PAUD di Kabupaten Tanah Bumbu mencapai rata-rata skor 3,63 (skala 1–4), dengan Standar Pembiayaan sebagai komponen terkuat (3,77) dan Standar Sarana Prasarana sebagai titik paling kritis (3,35). Analisis komparatif lintas instrumen menunjukkan pola tidak linier antara skor SSN, capaian akademik, kualitas sarana-prasarana, dan akreditasi, mengindikasikan bahwa pemenuhan standar masih lebih bersifat administratif daripada mencerminkan mutu pembelajaran yang sesungguhnya.
2. Disparitas Layanan PAUD Antarwilayah dan Antarlembaga Memerlukan Intervensi Kebijakan Berbasis Bukti. Terdapat kesenjangan yang nyata antara wilayah perkotaan dan terpencil, serta antara sekolah negeri dan swasta. Sebanyak 41,6% satuan PAUD masih berakreditasi C atau belum terakreditasi, 476 guru belum berkualifikasi S1/DIV, dan defisit sarana pendidikan diproyeksikan terus membesar hingga 145 unit pada 2045. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan perencanaan seragam tidak efektif dan harus digantikan dengan model perencanaan berbasis analisis kebutuhan yang membedakan intervensi sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
3. Model Perencanaan Berbasis AGIL Terbukti Relevan sebagai Kerangka Strategis Peningkatan Mutu PAUD Berkelanjutan. Pendekatan AGIL yang mengintegrasikan adaptasi kurikulum, pencapaian target terukur, sinergi lintas sektor, dan pelestarian nilai lokal memberikan kerangka kerja yang sistemik dan kontekstual. Dua belas sekolah terpilih sebagai model SSN dengan target bertahap 90%–100% pada 2030 menjadi pijakan strategis bagi perencanaan anggaran dan program lintas sektor yang berorientasi pada pemerataan layanan PAUD yang bermutu di seluruh Kabupaten Tanah Bumbu.

Saran

1. Membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal yang Terintegrasi. Dinas Pendidikan perlu mengembangkan platform data terpadu yang mengintegrasikan instrumen penilaian SSN, akreditasi, observasi sarana-prasarana, dan tes kemampuan akademik secara real-time. Frekuensi dan kualitas supervisi pengawas perlu ditingkatkan untuk mempersempit kesenjangan persepsi antara penilaian internal dan eksternal, sekaligus memperkuat harmonisasi antara instrumen SSN dan akreditasi agar keduanya saling memperkuat dalam memberikan gambaran mutu yang akurat dan dapat ditindaklanjuti.
2. Akselerasi Pemenuhan Sarana Prasarana dan Kualifikasi Pendidik melalui Program Afirmasi Berbasis Kewilayahan. Pemerintah daerah perlu merancang program afirmasi yang menysar wilayah dengan keterbatasan terbesar melalui pembiayaan kolaboratif antara APBD, dana desa, dan CSR untuk pembangunan sarana fisik PAUD. Percepatan kualifikasi guru perlu didukung dengan beasiswa S1 PAUD, pendampingan berbasis lesson study, dan kemitraan dengan perguruan tinggi lokal agar target 90% guru berkualifikasi S1/DIV pada 2030 dapat tercapai secara

realistis dan terukur.

3. Memperkuat Kolaborasi Lintas Sektor dan Pelibatan Aktif Orang Tua serta Masyarakat. Dinas Pendidikan perlu menjadi koordinator aktif dalam sinergi lintas SKPD yang diikat oleh Rencana Aksi Daerah yang terukur dan berpenganggaran jelas. Sosialisasi tentang pentingnya PAUD sebagai fondasi wajib belajar 13 tahun harus diintensifkan melalui berbagai kanal komunitas, termasuk peran tokoh agama, agar Angka Partisipasi Kasar yang turun ke 67,43% pada 2024 dapat kembali meningkat secara berkelanjutan melalui kesadaran kolektif masyarakat.

Daftar Pustaka

- Berk, L. E. (2021). *Development Through the Lifespan* (8th ed.). Pearson.
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2025). *Indikator Pendidikan dan Kependudukan Provinsi Kalimantan Selatan 2025*. Banjarbaru: BPS Kalsel.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu. (2025). *Laporan Kajian Teknis Perencanaan Sekolah Standar Nasional PAUD dan PnF Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025*. Batulicin: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.
- Garnika, E., & Rohiyatun, B. (2025). Implementation of Curriculum Merdeka in Early Childhood Education (PAUD). *Jurnal Visionary*, 13(1), 119–123.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10, 12, dan 13 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan Kurikulum PAUD*. Jakarta: Kemendikdasmen.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Lestari, P. D., & Putri, N. (2023). Analisis Kompetensi Pendidik dalam Pemenuhan Standar Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Profesional*, 12(2), 89–104.
- Lisnawati, R., Jannah, N. L., & Andika Sari, D. (2024). Independent curriculum policy in early childhood education units in Indonesia. *Jurnal Edusci*, 2(1), 14–22.
- Magendie, M., Suarni, S., & Kasim, K. (2023). Optimization of the transition from early childhood education (ECE) to primary school: Building school readiness through a literature review. *Journal of Leadership, Management and Policy in Education*, 2(2), 619–631. <https://doi.org/10.51454/jlmpedu.v2i2.619>
- Maulida, F. (2021). Pemenuhan Sarana dan Prasarana di PAUD Daerah Tertinggal. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(1), 75–92.
- Mulyani, S. (2024). Penguatan sumber daya manusia dalam implementasi indikator SSN di Tanah Bumbu. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 101–115.
- Prasetyo, A., & Widodo, B. (2023). Pengembangan peta jalan implementasi Sekolah Standar Nasional 2025–2030 di Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 12(1), 45–59.
- Putra, B., & Rahayu, S. (2020). Strategi Perencanaan Pendidikan Berbasis Data. *Jurnal Pendidikan dan Perencanaan*, 10(3), 273–289.
- Putri, A. D., Istikarani, M., Lisaryadi, L., Yennizar, N., & Latif, M. (2025). Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pesantren. *RIGGS Journal*, 4(2), 1–17. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1550>
- Rahman, F. (2022). Strategi penanggulangan disparitas dan penguatan literasi digital pada Sekolah Standar Nasional. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 8(3), 132–146.
- Ratna, A. (2025). Kebijakan pemerintah dalam pendidikan inklusi pada anak usia dini. *Indonesian Journal of Early Childhood*, 7(1), 143–155.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Santrock, J. W. (2019). *Child Development* (16th ed.). McGraw-Hill Education.

- Sari, D., & Nugroho, H. (2025). Evaluasi berkelanjutan dan pembaruan kebijakan pendidikan di era globalisasi. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(1), 77–90.
- Shalehah, N. A. (2023). Studi literatur: Konsep kurikulum merdeka pada PAUD. *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud*, 5(1), 45–53.
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability*. New York: Guilford Press.
- Sumintono, B., & Widhiarso, W. (2022). Aplikasi Pemodelan Rasch pada Assessment Pendidikan (Ed. ke-2). Cimahi: Trim Komunikata.
- Wijaya, H. (2021). Model Klasterisasi Satuan Pendidikan untuk Perencanaan Mutu. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(4), 301–317.
- Yulianti, A., & Rusmini, R. (2023). Management of early childhood education (PAUD). *The International Journal of Education Management and Sociology*, 2(6), 287–294.